

**PERILAKU MEMILIH PEMILIH PEMULA PUTUS SEKOLAH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN REMBANG
(STUDI PADA JENJANG PENDIDIKAN SMP)**

Devi Maharani¹

Rina Martini²

*¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro*

NIM : 14010117130040

devimhrn18@gmail.com

*²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro*

rinamartini13@gmail.com

ABSTRAK

Pemilih pemula merupakan warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu untuk memberikan suara pertama kali sejak pemilu diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilihnya ini, belum memiliki jangkauan politik yang luas yang membuat mereka sangat rawan untuk dipengaruhi dan didekati oleh pihak tertentu. Sosialisasi mengenai politik dan pemilu tengah diberikan kepada para calon pemilih pemula terutama yang berada di jenjang pendidikan SMA, hal ini membuat pemilih yang mengalami putus sekolah di jenjang pendidikan sebelumnya tidak sempat mendapatkan sosialisasi tersebut. Oleh karena itu penelitian ini akan menfokuskan untuk mengetahui perilaku memilih pemilih pemula putus sekolah dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Rembang, khususnya di jenjang pendidikan SMP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga pendekatan dalam perilaku pemilih yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan

rasional, para informan cenderung lebih mengarah ke pendekatan rasional. Mereka memilih kandidat pilihannya dengan memperhatikan kualitas dari kandidat dan berusaha untuk memilih kandidat yang menurut mereka lebih baik dan lebih mampu untuk menjadi seorang pemimpin serta yang memberikan keuntungan baik bagi dirinya maupun bagi negara.

Kata kunci : Pemilihan Umum, Perilaku Pemilih, Pemilih Pemula, Anak Putus Sekolah

ABSTRACT

Youth voters are citizens who are registered by the election organizer in the voter list, and just participating in the election to vote for the first time since the election was held in Indonesia with an age range of 17-21 years. Youth voters who have just entered the age of their voting rights don't have a broad political reach yet, which makes them very vulnerable to be influenced and approached by certain parties. Socialization about politics and elections is being given to the beginner voters, especially those at the senior high school education level, this has made voters who have dropped out of school at the previous education level not having the opportunity to get the socialization. Therefore this research will focus on finding out the voting behavior of the youth voters who dropped out of school in the 2019 general election in Rembang Regency, especially at the junior high school level. This study uses a qualitative descriptive method to achieve the research objectives. The results showed that between the three approaches to voter behavior, the sociological approach, the psychological approach, and the rational approach, the informants tended to be prefer to rational approach. They choose the candidate of their choice by paying attention to the quality of the candidate and trying to choose a candidate who they think is better and more capable of becoming a leader and who will give benefits both for themselves and the country.

Keywords: General Election, Voter Behavior, Youth Voters, School Dropouts

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang didasarkan prinsip bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Maksudnya adalah rakyat memegang kekuasaan paling tinggi dalam negara tersebut sehingga mereka berhak terlibat dalam segala aktivitas politik. Salah satu perwujudan dari hal ini dilaksanakan melalui proses pemilihan umum atau pemilu untuk mencari sosok pemimpin bagi negara tersebut. Selain itu, pemilu juga dapat menjadi tempat bagi rakyat untuk turut serta dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan maupun sistem-sistem pemerintahan yang berlaku, dengan berkesempatan untuk memutuskan wakilnya di berbagai lembaga-lembaga negara, seperti lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh komisi pemungutan suara bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada umumnya kegiatan ini diselenggarakan dalam jangka waktu 5 tahun sekali. Pemilu, dalam prosesnya sendiri berpegang pada 6 asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Parameter demokrasi dalam sistem perekrutan pejabat politik dapat dicapai dengan menerapkan asas-asas ini.

17 April 2019 beberapa waktu lalu, negara Indonesia menyelenggarakan “pesta demokrasi” melalui pemilihan umum yang tujuan utamanya adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden serta badan legislatif periode selanjutnya. Pelaksanaan pemilu tersebut menjadi bukti nyata Indonesia merupakan negara demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan sebagai salah satu indikator keberhasilan atau sebagai tolak ukur kesuksesan negara demokrasi. Hal ini dikarenakan dalam prosesnya seluruh masyarakat dengan kriteria yang telah terpenuhi, ikut serta untuk memberikan partisipasinya secara langsung dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, warga negara sebagai pemilih merupakan penentu atau dapat dikatakan mengambil bagian penting dalam pemilu. Pengertian dari pemilih sendiri telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat 34 yang menyebutkan bahwa pemilih adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas)

tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Di antara para pemilih dalam pemilu yang diselenggarakan tersebut terdapat pemilih pemula yang ikut terdaftar sebagai pemilih. Maksud dari pemilih pemula ini yaitu mereka yang menyumbangkan suaranya dalam pemilihan umum untuk pertama kali dengan rentang usia 17-21 tahun.

Elit-elit politik cenderung menjadikan para pemilih pemula sebagai sasaran yang selalu diperebutkan dengan elit yang lain. Berbagai program biasanya mereka buat dalam waktu mendekati pemilu dengan tujuan untuk menjaring atau memikat para pemilih pemula. Pembangunan komunitas-komunitas dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu mereka lakukan untuk mendapatkan dukungan dan suara untuk memenangkan pemilu dari para pemilih pemula tersebut, karena satu suara sangat memengaruhi kemenangan politik dalam pemilu.

Namun demikian, karena baru memasuki usia hak pilihnya, jangkauan politik para pemilih pemula masih sempit sehingga mereka masih kesulitan untuk memutuskan arah pilihan mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan siapa yang mereka pilih dalam pemilu tidak seperti yang mereka harapkan, atau dapat juga dikatakan tidak sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Alasan inilah yang terkadang membuat para pemilih pemula lebih mudah terpengaruh melalui berbagai pendekatan oleh partai-partai politik maupun kandidat tertentu terutama dengan menggunakan pendekatan materi politik. Politik praktis yang masih awam dalam kehidupan mereka, ditambah lagi dengan banyaknya pilihan dalam pemilu, seringkali menjadikan pikiran pemilih pemula menjadi tidak rasional dan pada akhirnya kepentingan jangka pendeklah yang menjadi dasar pilihan mereka. Parpol atau calon tertentu bahkan berusaha memenangkan pemilihan tanpa memberikan pencerdasan dalam hal politik dan hanya menempatkan pemilih pemula sebagai objek politik. Pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran dalam memilih pada pemilu yang minim inilah yang membuat pemilih pemula memiliki potensi besar untuk bertindak apatis.

Saat ini pendidikan maupun sosialisasi politik tengah gencar diberikan kepada anak-anak sekolah terutama setelah mereka memasuki jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) yang bertujuan guna memberi pemahaman yang baik dan benar mengenai politik dan meningkatkan minat demokrasi pada anak. Memberikan pemahaman politik yang baik dan benar kepada para pemilih pemula, khususnya dalam hal pemilu ini amat penting untuk dilakukan. Pemberian kesan pertama yang positif

harus diberikan oleh pemerintah, bersama dengan pihak lainnya pada pemilih pemula, mereka harus diyakinkan bahwa suaranya sangatlah penting karena mampu menaikkan kesejahteraan hidup bangsa dan memiliki peranan penting untuk menentukan nasib pemerintahan berikutnya. Pemberian paham yang positif ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus menjadi pemilih yang cerdas. Namun demikian, saat ini di Indonesia masih terdapat banyak anak yang mengalami putus sekolah, baik di tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), maupun SMA (Sekolah Menengah Atas). Anak-anak yang mengalami putus sekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) inilah yang kemudian tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan maupun sosialisasi politik yang menyebabkan mereka tidak begitu mengerti mengenai hal tersebut. Padahal kelak mereka juga akan berpartisipasi dalam pemilihan umum sebagai pemilih pemula.

Rembang, sebagai salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah, memiliki angka anak putus sekolah yang tinggi di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) yaitu berada di atas rata-rata anak yang mengalami putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Peneliti menggunakan data pada tahun ajaran 2015/2016 dikarenakan anak SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang mengalami putus sekolah di tahun tersebut baru memasuki usia pilih dan terdaftar sebagai pemilih pemula yang dapat memakai hak pilihnya dalam pemilu pada 17 April 2019 yang lalu.

KAJIAN PUSTAKA

Pemilihan Umum

Pemilu dapat dikatakan menjadi syarat minimal dari negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan yang *fair* dan *periodik* merupakan salah satu karakteristik dari berjalannya sistem demokrasi. Pemilu juga menjadi bentuk lain dari upaya pemenuhan hak asasi masyarakat dalam bidang politik. Pemilu ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kedaulatan warga, karena seperti yang kita ketahui, tidak memungkinkan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan pemerintahan secara langsung. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemilihan umum juga merupakan wadah bagi seseorang guna terlibat dalam kontrak sosial dengan para pemilih (masyarakat) yang telah mempunyai hak pilihnya. Berbagai rangkaian kegiatan politik pun dapat dilaksanakan sebelumnya, seperti melakukan kampanye, membuat iklan politik melalui berbagai jenis media, yaitu media cetak, audio (radio), maupun audio-visual (televisi) serta media lain seperti spanduk, selebaran, juga melalui komunikasi antar individu dalam bentuk tatap muka atau *lobbying* yang berupa penyampaian pesan dari kandidat untuk meyakinkan para pemilih agar mereka dapat memutuskan calon pilihan mereka untuk mewakili mereka di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Selain itu, pemilu ini juga menjadi wadah bagi para aktor politik untuk berkompetisi (berkontestasi) untuk memperoleh kekuatan dari masyarakat dan meliberalisasi hak mereka.

Pemilih Pemula

Pemilih didefinisikan sebagai pihak yang dapat dipengaruhi dan diberi keyakinan yang kuat dari para peserta pemilu agar mereka mendapat dukungan dan suara dari para pemilih tersebut. Sedangkan pemilih pemula sendiri merupakan seorang WNI dengan usia 17 tahun atau lebih, ataupun telah menikah, di mana sebelumnya mereka belum pernah berada dalam daftar pemilih karena ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum. Mayoritas pemilih pemula biasanya berusia sekitar 17-21 tahun, kecuali yang sudah menikah. Secara umum, para pemilih pemula ini terdiri dari para pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda.

Perilaku Politik

Perilaku politik adalah studi mengenai perilaku seorang manusia, khususnya terhadap aktor politik, pemilih, dan politisi. Dikarenakan dalam berpolitik seseorang diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan ide-ide konseptual dalam ilmu politik, maka perilaku politik ini dapat dianggap menjadi suatu kebutuhan dalam

politik. Gambaran tertentu mengenai interaksi yang terjadi di antara tindakan politik warga negara dan proses politiknya dalam kehidupan berdemokrasi juga dijelaskan dalam perilaku politik. Dengan demikian, perilaku politik merupakan perilaku yang berkaitan dalam kegiatan pembuatan, pelaksanaan, serta penegakan keputusan politik berupa hasil dari adanya hubungan timbal balik di antara pemerintah dengan masyarakat, serta antar kelompok dan individu dalam masyarakat.

Tindakan dalam kegiatan ini, pada terbagi menjadi dua jenis, yaitu dalam fungsi pemerintahan dan fungsi politik yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi, fungsi pemerintah dan juga fungsi politik pada umumnya dilakukan oleh struktur berbeda, yaitu supra struktur politik untuk fungsi politik pemerintahan dan infra struktur politik untuk fungsi politik masyarakat. Segala tindakan tersebut, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat memiliki kaitan untuk mencapai tujuan masyarakat serta dengan kebijakan-kebijakan dan sistem kekuasaan yang memiliki kemungkinan untuk digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Perilaku Pemilih

Salah satu bentuk dari perilaku politik adalah perilaku pemilih yang dapat dilihat dalam proses pemilihan umum. Perilaku ini merupakan langkah dari setiap individu dalam rangka memutuskan keikutsertaannya atau dapat dikatakan untuk menentukan apakah ia ingin memilih atau tidak memilih (*to vote or to not vote*) dalam kegiatan pemilu.

Perilaku dan interaksi antar individu dalam pemilu memiliki kaitan yang sangat erat dengan perilaku pemilih, khususnya mengenai ketertarikan politiknya dengan partai atau kandidat politik yang mereka sukai atau yang dirasa paling cocok, yang akan mereka pilih di masa mendatang. Kecocokan masyarakat dalam menentukan dan mengubah sikap serta perilakunya dalam berbagai bidang harus disesuaikan dengan kondisi dan dinamika kehidupan masyarakat yang sudah mapan sebelumnya.

Dalam kegiatan analisis perilaku pemilih, terdapat tiga pendekatan yang dapat dipergunakan di dalamnya, yaitu :

Pendekatan Sosiologis

Dasar dari pendekatan ini terdapat pada penjelasan mengenai karakteristik-karakteristik sosial layaknya pendidikan, pekerjaan, dan kelompok sosial layaknya

agama, wilayah, usia, jenis kelamin yang memiliki signifikansi pengaruh dalam penentuan perilaku dari para pemilih. Hal ini dikarenakan para pemilih akan cenderung memilih seseorang maupun suatu partai yang memiliki kesamaan latar belakang sosiologis dengan yang mereka miliki. Kesamaan latar belakang inilah yang akan mendorong mereka untuk memilih.

Pendekatan Psikologis

Konsep sosialisasi dan sikap digunakan dan dikembangkan dalam pendekatan psikologis guna menjelaskan perilaku para pemilih. Berdasarkan pendekatan ini, dapat diketahui bahwa adanya kecukupan informasi yang dimiliki, serta memiliki keyakinan bahwa pilihan mereka berarti dan dapat membantu memperbaiki keadaan, bukanlah alasan para pemilih mengikuti pemilu. Namun, dalam pendekatan ini, kedekatan secara emosional atau perasaan memiliki terhadap partai atau kandidat memberikan pengaruh lebih daripada faktor-faktor tersebut. Hal ini dibentuk oleh proses sosialisasi yang panjang, yang menciptakan koneksi emosional antara pemilih dengan kandidat atau partai bersangkutan yang pada akhirnya tanpa sadar membentuk suatu identifikasi. Secara umum, pendekatan psikologis terhadap perilaku pemilih ini melingkupi beberapa hal diantaranya, proses identifikasi dari seseorang terhadap parpol atau identitas suatu partai, pendapat mengenai isu-isu maupun kebijakan publik tertentu yang masih memiliki keterkaitan, serta pendapat mengenai kualitas pribadi dari kandidat atau tokoh-tokoh yang berada dalam suatu partai yang mencalonkan dirinya dalam kegiatan pemilu.

Pendekatan Rasional

Pendekatan ini berasal dari sudut pandang ekonomi, di mana keuntungan yang didapat oleh pemilih dalam proses partisipasi maupun pemungutan suara lebih diutamakan dalam hal ini. Sebagaimana yang terkandung dalam prinsip ekonomi, membelanjakan modal seminimal mungkin guna memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Dengan kata lain, pemilih tidak masalah terhadap konsep politik yang diberikan oleh parpol atau kandidat, melainkan mengandalkan keuntungan yang didapat saat memilih calon tersebut. Pendekatan ini digunakan pemilih untuk menentukan siapa yang akan mereka pilih, juga untuk menentukan apakah mereka akan memilih atau tidak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan lokasi penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Subjek dari penelitian ini merupakan anak-anak di Kabupaten Rembang yang mengalami putus sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun ajaran 2015/2016 yang mengikuti pemilihan umum pada tanggal 17 April 2019. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder serta teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah melalui proses wawancara secara mendalam dengan informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan dilengkapi dengan dokumentasi dari kegiatan penelitian tersebut. Lalu dalam proses analisis data, peneliti mempergunakan teknik analisis interaktif, seperti yang disarankan oleh Miles dan Huberman.

PEMBAHASAN

Anak Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Rembang

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Rembang, dapat diketahui terdapat total 55 anak yang mengalami putus sekolah di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Rembang pada tahun ajaran 2015/2016. Jumlah tersebut terdiri dari 31 anak laki-laki dan 24 anak perempuan. Kecamatan dengan jumlah anak putus sekolah paling tinggi terdapat di Kecamatan Sulang dengan 11 anak, disusul oleh Kecamatan Bulu dengan 7 anak, dan Kecamatan Rembang dengan 7 anak. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui bahwa terdapat kecamatan tanpa anak putus sekolah di tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) pada tahun tersebut, yaitu di Kecamatan Gunem, Kecamatan Sarang, dan Kecamatan Kragan.

Perilaku Memilih Anak Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan SMP di Kabupaten Rembang

Pada bab sebelumnya, telah disebutkan bahwa anak-anak putus sekolah, khususnya yang mengalami putus sekolah di jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) cenderung tidak begitu mengerti mengenai politik dan pemilu karena belum pernah mendapatkan pendidikan maupun sosialisasi mengenai kedua hal

tersebut yang pada umumnya baru diberikan di jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas). Hal ini kemudian diperkuat dengan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di mana seluruh informan membenarkan bahwa mereka belum pernah mendapatkan pendidikan maupun sosialisasi mengenai politik dan pemilu dari pihak manapun. Wawancara ini juga membuktikan bahwa pengetahuan mereka mengenai politik dan pemilu sangatlah kurang, layaknya ungkapan dari salah satu informan di bawah ini :

“Setahu saya politik itu ya politikus. Terus pemilu itu pemilihan, saya tahunya cuma itu saja.” (Ahmad Faqican Suburriyan, 17 tahun, wawancara pada 1 Oktober 2020).

Informan lainnya juga mengungkapkan hal serupa sebagai berikut :

“Politik itu ada kepala desa, RT, dan RW. Kalau pemilu itu pemilihan umum, saat ada coblosan, begitu yang saya tahu.” (Abdul Jalil, 18 tahun, wawancara pada 17 Oktober 2020).

Dari jawaban di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan anak putus sekolah di jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) mengenai politik dan pemilu masih berada pada tingkat dasar. Di mana mereka hanya mengetahui beberapa hal yang mendasar seperti kepanjangan dari pemilu sendiri dan tidak mengetahui hal lainnya. Di samping itu, di antara mereka bahkan masih terdapat beberapa yang tidak mengetahui mengenai pemilihan umum, padahal mereka merupakan orang-orang yang tergolong ke dalamnya.

Namun demikian, dari penelitian ini juga ditemukan bahwa seluruh informan menggunakan hak pilih mereka untuk ikut serta memilih dalam pemilihan umum pada tahun 2019 yang lalu atas kemauan mereka sendiri, bukan hanya karena diminta orang tua atau teman untuk ikut serta di dalamnya. Kemudian, peneliti juga ingin mencari tahu dari mana para pemilih pemula anak putus sekolah ini mendapatkan sumber informasi mengenai pemilu. Jawaban yang didapat peneliti melalui pertanyaan ini sangat beragam, di mana terdapat berbagai sumber yang digunakan oleh informan dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pemilu tersebut yaitu melalui media massa, media sosial, dan keluarga/teman.

Selanjutnya, merujuk pada hasil studi dan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, peneliti mencoba untuk membuat gambaran dan analisis mengenai

kecenderungan perilaku memilih pemula putus sekolah melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional, yang akan dijelaskan secara lebih lanjut sebagai berikut :

Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan jenis pendekatan yang cenderung berkaitan dengan konteks sosial dari seseorang yang dalam hal ini adalah para kandidat dalam pemilihan umum pada tahun 2019 yang lalu. Konkretnya, kesamaan latar belakang layaknya agama, suku, ras, kelas sosial, jenis kelamin, dan tempat tinggal (desa-kota) mempengaruhi pilihan seseorang dalam kegiatan pemilu.

Dalam penelitian ini, didapatkan fakta bahwa sebagian dari para informan mengungkapkan bahwa memang faktor latar belakang tersebut memberikan pengaruh terhadap pilihan mereka, dengan alasan terbesar karena mereka ingin memilih seseorang yang memiliki kesamaan agama dengan mereka yaitu yang beragama Islam, dan juga yang sama-sama berasal dari Pulau Jawa. Namun demikian, sebagian lainnya menyatakan bahwa hal itu tidak mempengaruhi mereka dalam menjatuhkan pilihannya.

Selain itu, pilihan pemilih berdasarkan pendekatan sosiologis ini juga dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan tempat tinggalnya, yaitu melalui lingkungan keluarga dan teman-temannya, di mana pada dasarnya seseorang akan menunjukkan perilaku ikut-ikutan. Pemilih pemula putus sekolah di Kabupaten Rembang sendiri, mayoritas mengatakan mereka memilih dengan pilihan mereka masing-masing tanpa terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Namun demikian tetap ada segelintir informan yang menyatakan masuk ke dalam perilaku ikut-ikutan ini, baik terhadap teman atau kedua orang tuanya.

Pendekatan Psikologis

Dalam pendekatan psikologis, faktor dominan yang paling mempengaruhi pilihan seseorang adalah adanya rasa memiliki atau kedekatan secara emosional terhadap suatu partai atau calon kandidat. Hal ini terbentuk melalui proses sosialisasi panjang yang melahirkan ikatan emosional (identifikasi) yang membentuk ikatan yang kuat antara pemilih dengan kandidat maupun partai politik yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan kepada para pemilih pemula putus sekolah di Kabupaten Rembang, dapat dikatakan bahwa pemilih tidak menjatuhkan pilihannya dengan pendekatan psikologis ini. Hal ini dikarenakan seluruh

informan menyatakan tidak merasa memiliki kedekatan emosional tersendiri terhadap suatu partai maupun kandidat yang ada. Seperti yang disebutkan sebelumnya, adanya rasa kedekatan secara emosional ini terjadi karena adanya proses sosialisasi yang panjang dari kandidat maupun partai politik bersangkutan. Namun, hal ini tentunya tidak berpengaruh kepada para pemilih putus sekolah karena mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dalam bentuk apapun sebelumnya. Itulah mengapa seluruh informan menjawab tidak merasa memiliki kedekatan apapun dengan kandidat maupun partai politik yang merupakan kontestan dalam pemilu tahun 2019 yang lalu.

Namun demikian, pilihan seseorang dari pendekatan ini juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu kharisma dari seorang kandidat yang menjadi sosok idaman bagi pemilih yang lebih memberikan pengaruh ke psikologis para pemilih pemula putus sekolah di Kabupaten Rembang dalam penelitian ini, di mana sebagian dari mereka menyatakan memilih karena faktor ini.

Pendekatan Rasional

Pendekatan rasional atau biasa dikenal dengan sebutan pendekatan ekonomik, pertama kali dikembangkan pada tahun 1960-an. Pengembangan pendekatan ini dimulai seusai ditemukan survei mengenai keberagaman pendapat dalam berbagai pandangan, di mana keuntungan yang didapatkan oleh para pemilih ketika ikut serta untuk berpartisipasi dalam pemilihan lebih diutamakan.

Di antara ketiga pendekatan ini, para pemilih pemula putus sekolah di Kabupaten Rembang cenderung menjatuhkan pilihannya dengan menggunakan pendekatan rasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan jawaban, di mana seluruh informan menyatakan bahwa mereka memilih kandidat pilihannya dengan memperhatikan kualitas dari kandidat tersebut. Para informan menyatakan bahwa mereka berusaha untuk memilih kandidat yang lebih baik dari kandidat lainnya. Mereka melihat hal ini dari pengalaman politik sebelumnya dari masing-masing kandidat serta dengan mempertimbangkan visi dan misi yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat tersebut. Dari visi dan misi inilah para pemilih dapat mengetahui dan menilai kinerja dari pemerintah atau wakil-wakilnya, apakah mereka akan memberikan keuntungan atau justru memberikan kerugian baik bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat maupun bagi negara secara umum.

Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai *money politic* diajukan kepada para informan. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui adakah perolehan imbalan berupa uang maupun barang dari kandidat maupun partai tertentu yang diterima oleh para pemilih pemula ini. Pertanyaan ini masih berkaitan dengan pendekatan rasional, yang mana dalam konsep pilihan rasional dijelaskan bahwa kegiatan pemilihan dipandang sebagai suatu produk untuk mengukur keuntungan dan kerugian. Pertimbangan ini digunakan oleh para pemilih untuk memutuskan kandidat atau partai mana yang akan mereka pilih, juga untuk menentukan apakah mereka akan ikut serta dalam proses pemilihan ataupun sebaliknya. Dan dari proses wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa hampir semua informan menyatakan mereka pernah mendapatkan imbalan berupa uang maupun barang dalam pemilihan umum tahun 2019 yang lalu. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat, yaitu antara imbalan tersebut mempengaruhi pilihan akhir mereka atau tidak.

Jadi, dalam pendekatan rasional ini, pilihan dari seorang pemilih didasarkan pada keinginan dan keyakinan pribadi pemilih tersebut. Maksud dari hal ini adalah, setiap individu yang terlibat dalam proses pemberian suara memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan kandidat manapun yang akan dipilih olehnya. Dasar dari pilihan ini adalah berasal dari hasil pengumpulan berbagai informasi dan penilaian pribadi mereka terhadap masing-masing kandidat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anak-anak yang mengalami putus sekolah di jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) mengenai politik dan pemilu sangatlah kurang. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendidikan maupun sosialisasi mengenai politik dan pemilu yang diberikan kepada mereka dari pihak manapun.

Kemudian, dari ketiga pendekatan dalam perilaku memilih, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional, perilaku para pemilih pemula putus sekolah cenderung lebih mengarah ke pendekatan rasional. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan seluruh informan yang menyatakan bahwa mereka memilih kandidat pilihannya dengan memperhatikan kualitas dari kandidat tersebut yang dinilai

dari pengalaman politik sebelumnya dari masing-masing kandidat serta dengan mempertimbangkan visi dan misi yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat yang bersangkutan. Mereka menyatakan bahwa mereka berusaha untuk memilih kandidat yang menurut mereka lebih baik dan lebih mampu untuk menjadi seorang pemimpin.

Selain itu, juga terdapat fakta lain di mana hampir semua informan menyatakan mereka pernah mendapatkan imbalan berupa uang maupun barang dalam pemilihan umum tahun 2019 yang lalu. Hal ini sejalan dengan konsep pilihan rasional yang menjelaskan bahwa pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Dan di sini dapat terlihat jelas bahwa para pemilih putus sekolah di Kabupaten Rembang juga berusaha untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri.

Saran

Peneliti mengharapkan baik pemerintah maupun KPU (Komisi Pemilihan Umum) dapat lebih gencar dalam memberikan bentuk pendidikan politik yang bersifat menyeluruh dan persuasif, sehingga pemilih khususnya para pemilih pemula, juga yang mengalami putus sekolah dapat memiliki pengetahuan mengenai proses politik serta pemilu secara lebih luas dan lebih jelas. Selain itu, peneliti juga berharap agar kedepannya para pemilih khususnya bagi para pemilih pemula putus sekolah di Kabupaten Rembang dapat memilih secara lebih rasional tanpa terpengaruh oleh adanya *money politic*, dan agar budaya *money politic* ini dapat segera dihilangkan dari kehidupan masyarakat di Kabupaten Rembang sendiri serta di Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Moch. Rico Fiki. 2017. Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Perilaku Pemilih Pemula pada Pilkada Kota Surabaya Tahun 2015 (Studi pada Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya). *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Fernanda, Fitra Endi. 2016. Persepsi Pemilih Pemula terhadap Pilkada Serentak di Desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

- Ikhwan, Arif. 2016. Perilaku Memilih Pemilih Pemula Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar. *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khairunnisa. 2017. Partisipasi dan Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Presiden 2014 (Studi pada Siswa Lembaga Pendidikan Non-Formal BTA 45 Tebet, Jakarta Selatan). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mujani, Saiful, dkk. 2012. *Kuasa Rakyat: "Analisis tentang Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan.
- Muhammad, Asfar. 2006. *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. Jakarta: Pustaka Eureka.
- Nugraha, Aat Ruchiat, Nuryah Asri Sjarifah, dan Heru Ryanto Budiana. 2016 Perilaku Komunikasi Politik Pemilih Pemula di Pilkada Kabupaten Bandung. *Jurnal Komunikasi*. 1 (02): 102-113.
- Nur, Raoda, Ahmad Taufik, dan Muhammad Tahir. 2015. Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5 (1): 91-106
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Perdana, Agung Putra dan Ishak. 2018. Perilaku Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 3 (3): 1-15.
- Sitepu, P. Antonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. 2003. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Syarbaini, Syarial, Rusdiyanta, dan Doddy Wihardi. 2011. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.